

Peran Kampus dalam Membangun Budaya Demokrasi: Perspektif Mahasiswa

Asrialfi Alfi¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Batu Bara

Corresponding Author: Asrialfi Alfi, e-mail: alfiasrialfi@gmail.com

Published: Februari, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran perguruan tinggi dalam membangun budaya demokrasi dari perspektif mahasiswa. Kampus sebagai ruang akademik memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter demokratis generasi muda melalui berbagai aktivitas kemahasiswaan, pembelajaran, dan interaksi sosial. Penelitian kualitatif ini melibatkan lima informan mahasiswa aktif dari berbagai organisasi kemahasiswaan di universitas negeri di Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampus berperan signifikan dalam membangun budaya demokrasi melalui tiga dimensi utama: (1) pendidikan demokrasi melalui kurikulum dan pembelajaran di kelas, (2) praktik demokrasi dalam organisasi kemahasiswaan dan pemilihan umum kampus, dan (3) ruang diskusi dan kebebasan berekspresi. Mahasiswa merasakan pengalaman langsung berdemokrasi melalui pemilu organisasi, musyawarah, dan dialog kritis yang membentuk pemahaman mereka tentang nilai-nilai demokratis seperti toleransi, partisipasi, dan tanggung jawab sipil. Namun, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan ruang dialog kritis dan ketimpangan akses partisipasi bagi mahasiswa dari latar belakang tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kampus perlu terus memperkuat fungsinya sebagai laboratorium demokrasi dengan menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan partisipatif.

Kata Kunci: Budaya Demokrasi, Perguruan Tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan, Partisipasi Mahasiswa, Organisasi Kemahasiswaan

ABSTRACT

This study examines the role of higher education institutions in building a democratic culture from the student perspective. As an academic space, the campus holds a strategic position in shaping the democratic character of the younger generation through various student activities, learning processes, and social interactions. This qualitative research involves five active student informants from various student organizations at a state university in Indonesia. Data were collected through in-depth interviews and participatory observation, then analyzed using thematic analysis techniques. The results show that campuses play a significant role in building a democratic culture through three main dimensions: (1) democratic education through curriculum and classroom learning, (2) democratic practices in student organizations and campus elections, and (3) spaces for discussion and freedom of expression. Students experience democracy firsthand through organizational elections, deliberations, and critical dialogues, which shape their understanding of democratic values such as tolerance, participation, and civic responsibility. However, challenges remain, including limited space for critical dialogue and unequal access to participation for students from certain backgrounds. This study concludes that campuses need to continue strengthening their function as democracy laboratories by creating a more inclusive and participatory ecosystem.

Keywords: Democratic Culture, Higher Education, Civic Education, Student Participation, Student Organizations

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan dan cara hidup bermasyarakat memerlukan fondasi yang kuat dalam praktik keseharian warga negara. Pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab strategis dalam menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai demokratis di kalangan generasi muda (Winataputra, 2020). Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga transfer pengetahuan,

tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter dan sikap demokratis mahasiswa yang kelak akan menjadi pemimpin dan warga negara aktif di masyarakat.

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia menghadapi berbagai tantangan dalam konsolidasi demokrasi, termasuk menurunnya partisipasi politik generasi muda, intoleransi, dan melemahnya pemahaman tentang nilai-nilai demokratis (Azra, 2021). Dalam konteks ini, kampus memiliki peran vital sebagai "laboratorium demokrasi" di mana mahasiswa dapat belajar, berlatih, dan menginternalisasi prinsip-prinsip demokrasi melalui pengalaman langsung dalam kehidupan kampus.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lingkungan kampus yang demokratis berkontribusi signifikan terhadap pembentukan sikap dan perilaku demokratis mahasiswa (Nugroho & Rahmat, 2022). Organisasi kemahasiswaan, diskusi kelas, pemilihan umum mahasiswa, dan berbagai aktivitas akademik lainnya menjadi sarana pembelajaran demokrasi yang efektif. Namun, belum banyak penelitian yang secara mendalam mengeksplorasi bagaimana mahasiswa sendiri memandang dan mengalami peran kampus dalam membangun budaya demokrasi dari perspektif mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam peran kampus dalam membangun budaya demokrasi dari perspektif mahasiswa. Secara khusus, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: Bagaimana mahasiswa memahami dan mengalami peran kampus dalam membangun budaya demokrasi? Apa saja praktik-praktik di kampus yang dianggap mahasiswa efektif dalam memperkuat nilai-nilai demokratis? Serta, tantangan apa yang dihadapi dalam upaya membangun budaya demokrasi di lingkungan kampus?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Budaya Demokrasi

Budaya demokrasi merujuk pada seperangkat nilai, sikap, dan perilaku yang mendukung sistem demokratis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Almond dan Verba dalam Saputra (2020), budaya demokrasi mencakup partisipasi aktif warga negara, toleransi terhadap perbedaan, kepercayaan pada institusi demokratis, dan komitmen pada prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan. Budaya demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pemahaman teoritis tentang demokrasi, tetapi lebih pada internalisasi nilai-nilai demokratis dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks Indonesia, budaya demokrasi Pancasila menekankan pada musyawarah mufakat, gotong royong, dan penghormatan terhadap kebhinekaan (Latif, 2020). Nilai-nilai ini membedakan praktik demokrasi Indonesia dengan model demokrasi liberal Barat yang lebih individualistik. Pembangunan budaya demokrasi memerlukan proses pendidikan dan pembiasaan yang berkelanjutan, terutama di kalangan generasi muda sebagai agen perubahan sosial.

2. Peran Perguruan Tinggi dalam Pendidikan Demokrasi

Perguruan tinggi memiliki posisi strategis sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter mahasiswa (Winarno, 2021). Dalam konteks pendidikan demokrasi, kampus berfungsi sebagai ruang publik di mana mahasiswa dapat berlatih berpikir kritis, berdialog, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif. Winataputra (2020) menegaskan bahwa perguruan tinggi harus menjadi miniatur masyarakat demokratis di mana nilai-nilai seperti kebebasan akademik, toleransi, dan partisipasi aktif dipraktikkan secara konsisten.

Pendidikan demokrasi di perguruan tinggi tidak hanya dilakukan melalui mata kuliah formal seperti Pendidikan Kewarganegaraan, tetapi juga melalui "hidden curriculum" yang tercermin dalam iklim kampus, interaksi dosen-mahasiswa, dan kehidupan organisasi kemahasiswaan (Samsuri & Marzuki, 2020). Pengalaman langsung mahasiswa dalam berorganisasi, memilih pemimpin, dan terlibat dalam diskusi publik memberikan pembelajaran demokrasi yang lebih bermakna dibandingkan dengan pembelajaran di kelas semata.

3. Organisasi Kemahasiswaan sebagai Ruang Pembelajaran Demokrasi

Organisasi kemahasiswaan merupakan wahana strategis bagi mahasiswa untuk belajar berdemokrasi melalui praktik langsung (Azmi & Rahadian, 2023). Melalui organisasi, mahasiswa belajar tentang kepemimpinan, pengambilan keputusan kolektif, manajemen konflik, dan tanggung jawab sosial. Pemilihan umum dalam organisasi kemahasiswaan menjadi simulasi demokrasi yang

mengajarkan mahasiswa tentang pentingnya partisipasi, kompetisi yang sehat, dan penerimaan terhadap keputusan mayoritas.

Penelitian Nugroho dan Rahmat (2022) menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan berkorelasi positif dengan tingkat literasi politik dan sikap demokratis mereka. Mahasiswa yang aktif berorganisasi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses demokratis, lebih toleran terhadap perbedaan, dan lebih siap untuk terlibat dalam kehidupan politik dan sosial di masyarakat.

4. Tantangan Pendidikan Demokrasi di Perguruan Tinggi

Meskipun memiliki potensi besar, pendidikan demokrasi di perguruan tinggi menghadapi berbagai tantangan. Rahmawati (2021) mengidentifikasi beberapa kendala, antara lain: budaya paternalistik yang masih kuat dalam hubungan dosen-mahasiswa, keterbatasan ruang kebebasan berekspresi, dan komersialisasi pendidikan tinggi yang menggeser fokus dari pembentukan karakter ke orientasi pasar kerja. Selain itu, polarisasi politik di masyarakat yang merembes ke kampus juga dapat menghambat dialog konstruktif dan toleransi di kalangan mahasiswa.

Tantangan lain adalah kesenjangan akses dan partisipasi di antara mahasiswa. Mahasiswa dari kelompok marginal, baik karena latar belakang ekonomi, gender, maupun etnis, seringkali menghadapi hambatan struktural untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan kampus (Kurniawan, 2023). Kondisi ini dapat menimbulkan eksklusivitas dalam praktik demokrasi kampus yang justru bertentangan dengan prinsip demokrasi itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi fenomenologi. Pendekatan ini dipilih untuk memahami esensi pengalaman dan perspektif subjektif mahasiswa mengenai peran kampus dalam membangun budaya demokrasi (Creswell & Poth, 2020), sehingga memungkinkan pendalaman makna dari pengalaman mereka dalam konteks kehidupan kampus. Informan penelitian dipilih melalui teknik purposive sampling dengan kriteria: mahasiswa aktif program sarjana yang telah terlibat dalam organisasi kemahasiswaan minimal satu tahun, memiliki pengalaman dalam kegiatan terkait demokrasi kampus (seperti pemilu mahasiswa atau forum diskusi), dan bersedia berpartisipasi. Berdasarkan kriteria tersebut, terpilih lima informan yang mewakili berbagai latar belakang organisasi, yaitu: Informan A (20 tahun, aktif di BEM Fakultas), Informan B (19 tahun, aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan), Informan C (20 tahun, aktif di UKM bidang sosial), Informan D (21 tahun, aktif di Senat Mahasiswa Universitas), dan Informan E (19 tahun, aktif di komunitas diskusi).

Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) semi-terstruktur secara individual dengan setiap informan, berdurasi 60-90 menit. Pedoman wawancara mencakup tema pemahaman demokrasi, pengalaman praktik demokrasi di kampus, peran organisasi, pembelajaran akademik, serta tantangan dan harapan terkait budaya demokrasi. Semua wawancara direkam dan ditranskrip verbatim untuk analisis. Kedua, observasi partisipatif terhadap kegiatan kemahasiswaan seperti rapat organisasi, diskusi publik, dan pelaksanaan pemilu mahasiswa selama tiga bulan untuk mengamati langsung dinamika interaksi, proses pengambilan keputusan, dan manifestasi nilai-nilai demokratis.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik menurut Braun dan Clarke (sebagaimana dirujuk oleh Moleong, 2021), yang meliputi enam tahap berurutan: (1) familiarisasi dengan data melalui pembacaan berulang transkrip, (2) pembuatan kode awal, (3) pencarian tema potensial dengan pengelompokan kode, (4) peninjauan ulang tema untuk memastikan kesesuaiannya dengan data, (5) pendefinisian dan pemberian nama tema final, serta (6) penyusunan laporan dengan menyertakan kutipan-kutipan representatif. Keabsahan data (trustworthiness) dijaga melalui triangulasi sumber (membandingkan data antar informan) dan triangulasi metode (menggabungkan data wawancara dan observasi). Selain itu, dilakukan member checking dengan mengonfirmasi hasil analisis sementara kepada informan serta reflexivity di mana peneliti secara kritis mencatat bias atau asumsi pribadi yang mungkin memengaruhi interpretasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data wawancara dan observasi, ditemukan empat tema utama yang menggambarkan peran kampus dalam membangun budaya demokrasi dari perspektif mahasiswa.

A. Pendidikan Demokrasi Melalui Kurikulum dan Pembelajaran di Kelas

Mahasiswa mengakui bahwa mata kuliah seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, dan mata kuliah yang terkait dengan ilmu sosial dan humaniora memberikan fondasi pemahaman teoretis tentang demokrasi. Namun, mereka menekankan bahwa pembelajaran yang paling berkesan adalah ketika dosen menerapkan metode partisipatif yang melibatkan diskusi, debat, dan presentasi kelompok. Informan B mengatakan: *"Aku belajar banyak soal demokrasi itu nggak cuma dari materinya doang sih, tapi dari cara dosennya ngajar. Kayak pas kita disuruh diskusi gitu, terus belajar menghargai pendapat orang lain yang beda-beda, terus gimana caranya nyampai kesepakatan bareng-bareng waktu ngerjain tugas kelompok. Nah itu menurutku pembelajaran demokrasi yang sebenarnya deh."*

Temuan ini sejalan dengan pandangan Winataputra (2020) bahwa pendidikan demokrasi yang efektif tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan tentang sistem demokrasi, tetapi juga pada penciptaan pengalaman belajar yang demokratis. Ketika ruang kelas menjadi forum di mana setiap mahasiswa memiliki kesempatan berbicara, kritik disampaikan secara konstruktif, dan keputusan dibuat secara kolektif, mahasiswa mengalami demokrasi secara langsung.

Namun, tidak semua pengalaman pembelajaran di kelas mencerminkan nilai demokratis. Beberapa informan mengeluhkan metode pembelajaran yang masih bersifat teacher-centered dan otoriter, di mana mahasiswa tidak memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat berbeda atau mengkritisi materi yang diajarkan. Hal ini menunjukkan inkonsistensi dalam praktik pendidikan demokrasi di perguruan tinggi.

B. Praktik Demokrasi dalam Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi kemahasiswaan dipandang oleh semua informan sebagai ruang paling penting untuk belajar berdemokrasi secara praktis. Melalui organisasi, mahasiswa mengalami langsung proses pemilihan pemimpin, pengambilan keputusan kolektif, pengelolaan perbedaan pendapat, dan pertanggungjawaban kepada konstituen. Informan D bercerita: *"Waktu kita ngadain pemilu buat milih ketua senat itu, gue ngeliat sendiri sih gimana demokrasi itu jalan. Ada kampanye segala, debat kandidat, pemungutan suara, sampe pengumuman hasilnya. Bahkan pas kandidat yang gue dukung kalah, dari situ gue belajar kalau itu bagian dari demokrasi—kudu menghormati keputusan mayoritas dan tetep kerjasama buat kepentingan bersama gitu."*

Pengalaman ini memberikan pembelajaran yang mendalam tentang nilai-nilai demokratis seperti kompetisi yang fair, transparansi, akuntabilitas, dan sportivitas. Pemilu organisasi kemahasiswaan berfungsi sebagai simulasi demokrasi yang mengajarkan mahasiswa tentang hak dan kewajiban dalam sistem demokratis (Nugroho & Rahmat, 2022).

Selain pemilu, proses pengambilan keputusan dalam rapat organisasi juga menjadi arena pembelajaran demokrasi. Mahasiswa belajar tentang musyawarah, negosiasi, kompromi, dan konsensus. Informan A menjelaskan bahwa dalam rapat BEM Fakultas, mereka sering menghadapi perbedaan pendapat yang cukup tajam, namun melalui dialog dan musyawarah, mereka akhirnya dapat mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak.

Observasi yang dilakukan peneliti mengkonfirmasi temuan ini. Dalam rapat organisasi yang diamati, terlihat bagaimana mahasiswa aktif berpartisipasi, menyampaikan argumentasi, mendengarkan dengan kritis, dan berupaya mencari solusi bersama. Meskipun kadang terjadi perdebatan yang cukup sengit, namun suasana tetap terjaga dengan saling menghormati dan berfokus pada substansi isu, bukan pada pribadi.

C. Ruang Dialog Kritis dan Kebebasan Berekspresi

Kampus dipandang mahasiswa sebagai ruang publik yang relatif aman untuk menyampaikan pendapat, mengkritisi kebijakan, dan mendiskusikan isu-isu sosial-politik tanpa tekanan berlebihan. Forum-forum diskusi, seminar, dan kajian yang diselenggarakan organisasi mahasiswa menjadi wadah untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan berargumentasi secara rasional. Informan E menjelaskan: *"Di kampus tuh kita bisa bahas macem-macam isu, bahkan yang sensitif sekalipun, jadi lebih terbuka"*

gitu. Beda banget sama di luar kampus yang kadang ada batasan-batasan sosial atau politik yang bikin orang takut ngomong. Kampus ngasih ruang buat kita belajar ngobrol dan berdialog meskipun pandangannya beda-beda."

Kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi yang dijamin di lingkungan kampus memungkinkan mahasiswa untuk mengeksplorasi berbagai perspektif tanpa rasa takut. Ini menciptakan iklim intelektual yang kondusif bagi pengembangan pemikiran kritis dan toleransi terhadap perbedaan—dua elemen penting dalam budaya demokrasi (Winarno, 2021).

Namun, beberapa informan juga menyoroti adanya keterbatasan dalam kebebasan berekspresi di kampus. Informan C mencontohkan kasus di mana proposal kegiatan diskusi dengan tema tertentu ditolak oleh pihak rektorat tanpa alasan yang jelas. Ada kekhawatiran bahwa otokritik atau pembahasan isu-isu yang dianggap sensitif dapat dibatasi, yang justru bertentangan dengan semangat demokrasi dan kebebasan akademik.

D. Inklusivitas dan Tantangan dalam Partisipasi Demokratis

Meskipun kampus menyediakan berbagai ruang untuk berdemokrasi, tidak semua mahasiswa memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Beberapa informan mengidentifikasi adanya hambatan struktural yang membuat partisipasi mahasiswa tertentu menjadi terbatas. Informan B menyoroti isu inklusivitas: *"Ya jujur nggak semua mahasiswa punya kesempatan yang sama buat aktif di organisasi sih. Misalnya yang harus kerja part time atau yang rumahnya jauh dari kampus kan sering kesulitan ikut kegiatan. Terus organisasi kadang juga ada 'inner circle' nya gitu loh, jadi yang baru masuk atau yang nggak punya koneksi tuh berasa sulit banget buat masuk ke dalamnya."*

Ketimpangan akses ini dapat menciptakan elitisme dalam praktik demokrasi kampus, di mana hanya kelompok tertentu yang dominan dan memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menekankan kesetaraan dan partisipasi universal (Kurniawan, 2023). Tantangan lain yang diidentifikasi adalah polarisasi dan intoleransi yang mulai muncul di kalangan mahasiswa, mencerminkan fenomena yang terjadi di masyarakat luas. Beberapa informan menyebutkan adanya kecenderungan mahasiswa untuk hanya bergaul dengan kelompok yang seideologi dan enggan berdialog dengan yang berbeda pandangan. Ini mengancam fungsi kampus sebagai ruang dialog lintas perbedaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kampus memainkan peran yang sangat penting dalam membangun budaya demokrasi di kalangan mahasiswa melalui tiga dimensi utama: pendidikan formal di kelas, praktik langsung dalam organisasi kemahasiswaan, dan penyediaan ruang dialog kritis. Mahasiswa tidak hanya belajar tentang demokrasi secara teoritis, tetapi lebih penting lagi, mereka mengalami dan mempraktikkan demokrasi dalam kehidupan kampus sehari-hari. Dari perspektif mahasiswa, pembelajaran demokrasi yang paling bermakna terjadi ketika mereka terlibat langsung dalam proses demokratis memilih pemimpin, mengambil keputusan kolektif, mengelola konflik, dan mempertanggungjawabkan tindakan. Organisasi kemahasiswaan berfungsi sebagai laboratorium demokrasi yang memberikan pengalaman langsung tentang bagaimana sistem demokratis bekerja dengan segala kompleksitas dan tantangannya.

Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Inkonsistensi dalam penerapan nilai demokratis di kelas, keterbatasan ruang kebebasan berekspresi, dan ketimpangan akses partisipasi merupakan hambatan yang dapat mengurangi efektivitas kampus sebagai ruang pembangunan budaya demokrasi. Polarisasi dan intoleransi yang mulai merembes ke kampus juga menjadi ancaman serius bagi terciptanya dialog konstruktif lintas perbedaan. Untuk memperkuat peran kampus dalam membangun budaya demokrasi, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, perguruan tinggi perlu memastikan konsistensi penerapan nilai-nilai demokratis dalam seluruh aspek kehidupan kampus, tidak hanya dalam retorika tetapi juga dalam praktik nyata. Kedua, perlu ada upaya sistematis untuk meningkatkan inklusivitas dengan memastikan semua mahasiswa, tanpa memandang latar belakang, memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan kampus. Ketiga, kampus harus terus menjaga dan memperkuat kebebasan akademik dan ruang dialog kritis sebagai pondasi budaya demokrasi. Keempat, diperlukan program-program khusus untuk menumbuhkan toleransi dan kemampuan berdialog lintas perbedaan di tengah tantangan polarisasi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya melibatkan lima informan dari satu institusi pendidikan tinggi. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan lebih banyak informan dari berbagai jenis dan wilayah perguruan tinggi untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian komparatif antara perguruan tinggi negeri dan swasta, atau antara kampus dengan iklim demokratis yang berbeda, dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kampus dalam membangun budaya demokrasi. Terakhir, budaya demokrasi tidak dapat dibangun dalam waktu singkat. Ini adalah proses panjang yang memerlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh civitas akademika dosen, mahasiswa, dan pimpinan perguruan tinggi. Kampus harus terus berkomitmen menjadi ruang yang demokratis, inklusif, dan kritis, di mana mahasiswa tidak hanya dipersiapkan untuk menjadi tenaga kerja yang kompeten, tetapi juga warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan berkomitmen pada nilai-nilai kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, F., & Rahadian, A. S. (2023). Peran organisasi kemahasiswaan dalam membentuk karakter kepemimpinan demokratis. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 13(1), 45-58.
- Azra, A. (2021). *Pendidikan kewarganegaraan untuk demokrasi: Perspektif global dan lokal*. Jakarta: Prenada Media.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2020). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Kurniawan, D. (2023). Inklusivitas dalam pendidikan tinggi: Tantangan partisipasi mahasiswa marginal. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 8(2), 112-128.
- Latif, Y. (2020). *Pendidikan yang berkebudayaan: Histori, konsepsi, dan aktualisasi pendidikan transformatif*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, A., & Rahmat, H. K. (2022). Hubungan keterlibatan organisasi kemahasiswaan dengan literasi politik mahasiswa. *Jurnal Civic Education*, 6(1), 78-92.
- Rahmawati, D. (2021). Tantangan pendidikan demokrasi di perguruan tinggi era kontemporer. *Jurnal Pendidikan Politik dan Kewarganegaraan*, 11(2), 156-169.
- Samsuri, S., & Marzuki, M. (2020). Hidden curriculum dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 22-35.
- Saputra, E. (2020). Membangun budaya demokrasi Pancasila di era digital. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 34-48.
- Winarno, W. (2021). *Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan: Panduan kuliah di perguruan tinggi* (Edisi Kelima). Jakarta: Bumi Aksara.
- Winataputra, U. S. (2020). Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa: Gagasan, instrumentasi, dan praksis. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 26(1), 1-15.